

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Instansi**

##### **1. Sejarah Perkembangan Institusi**

PD BPR Bank Sleman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 1962 tanggal 19 Mei 1962 tentang Mengadakan Bank Pasar. Keberadaannya kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Nomor 6/K/1969 tanggal 21 Januari 1969 tentang Penetapan Bank–Bank Pasar dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 3/K/1970 tanggal 24 Maret 1970 tentang Pedoman Pelaksanaan Bank Pasar Daerah Kabupaten Sleman. Sejak tahun 1970 inilah, PD BPR Bank Sleman yang pada saat pendiriannya bernama "Bank Pasar" ini memulai aktivitasnya di bidang perbankan.

Seiring perkembangan usahanya, kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 076/Kep. KDH/1981, tanggal 21 Juli 1981, tentang Anggaran Dasar Sementara Perusahaan Daerah "Bank Pasar" Kabupaten Dati II Sleman. Anggaran Dasar Sementara tersebut lalu disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 15 Tahun 1983 tanggal 21 Juni 1983 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

209/KPTS/1983, tanggal 21 November 1983 dan telah mendapat Surat Keterangan Ijin Usaha Bank Pasar dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-387/MK.11/1981, tanggal 28 November 1981.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 30 Tahun 1995, tanggal 6 September 1995 yang disahkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Keputusan Nomor 95/KPTS/1996 tertanggal 15 April 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 3 Seri D tanggal 30 Juni 1996 bentuk hukum perusahaan ini dirubah menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Dati II Sleman.

Pada tahun 2008 dikeluarkan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BANK SLEMAN tertanggal 16 Januari 2008 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri D tanggal 18 Januari 2008. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Yogyakarta No.10/2/KEP.PBI/Yk/2008 tanggal 18 Februari 2008.

Sedangkan pada tahun 2013 diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang PD BPR Bank Sleman dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) antara lain Modal PD BPR Bank Sleman bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dan Modal PD BPR Bank Sleman merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilakukan penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah).

Penyempurnaan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun

2013 Nomor 4 Seri D dengan beberapa perubahan antara lain Modal dasar PD BPR Bank Sleman ditetapkan sebesar Rp 230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah).

## 2. Visi dan Misi PD BPR Bank Sleman

PD. BPR Bank Sleman memiliki visi “*Menjadi bank yang unggul di daerah, profesional dan terkemuka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*”. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

### 1. Bank Unggul di Daerah:

Menjadi BPR dengan aset, laba dan pangsa pasar (kredit dan dana pihak ketiga) terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 2. Profesional:

- a. Bank dikelola dengan prinsip TARIF yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), *Independency* (Independensi) dan *Fairness* (Kewajaran), dengan prinsip kehati-hatian serta menerapkan manajemen risiko yang memadai dan efektif.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu sehat, jujur, disiplin, semangat, tanggung jawab, terdidik dan berpengalaman.

3. Terkemuka:

- a. Mendapatkan penghargaan-penghargaan tingkat lokal dan nasional.
- b. Menjadi Bank yang sehat.
- c. Memberikan pelayanan terbaik dengan dukungan Teknologi Informasi yang handal.

4. Kesejahteraan Masyarakat:

- a. Menyalurkan kredit kepada sektor UMKM.
- b. Menyalurkan kredit kepada PNS dan masyarakat umum.

Adapun misi yang dimiliki oleh PD. BPR Bank Sleman yaitu:

1. Menjalankan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi secara unggul, profesional dan terkemuka.
  - a. Mempertahankan dan meningkatkan sebagai BPR dengan aset, laba dan pangsa pasar terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Berusaha meningkatkan kinerja bank menjadi lebih baik.
  - c. Mempertahankan tingkat kesehatan bank.
  - d. Memberikan pelayanan terbaik dengan dukungan teknologi informasi yang handal.

- e. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan prinsip kehati-hatian.
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menjadi salah satu bagian usaha Pemda dalam membantu meningkatkan pembiayaan UMKM dan masyarakat umum. Misi ini merupakan landasan kegiatan dan inspirasi bagi pegawai serta segenap *stakeholders* Bank dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi. PD BPR Bank Sleman memiliki motto "*Bank Sleman Sahabat Terbaik Anda*". Motto tersebut bermakna bahwa seluruh rencana yang disusun akan direalisasikan PD BPR Bank Sleman didasari semangat untuk selalu kreatif, proaktif dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan dan mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan dalam mewujudkan perusahaan perbankan professional dan terkemuka sebagai salah satu mitra pemda dalam menjalankan program peningkatan kesejahteraan.

### 3. Struktur Organisasi Institusi

#### Struktur Organisasi Kantor Pusat PD. BPR Bank Sleman

##### Dewan Pengawas

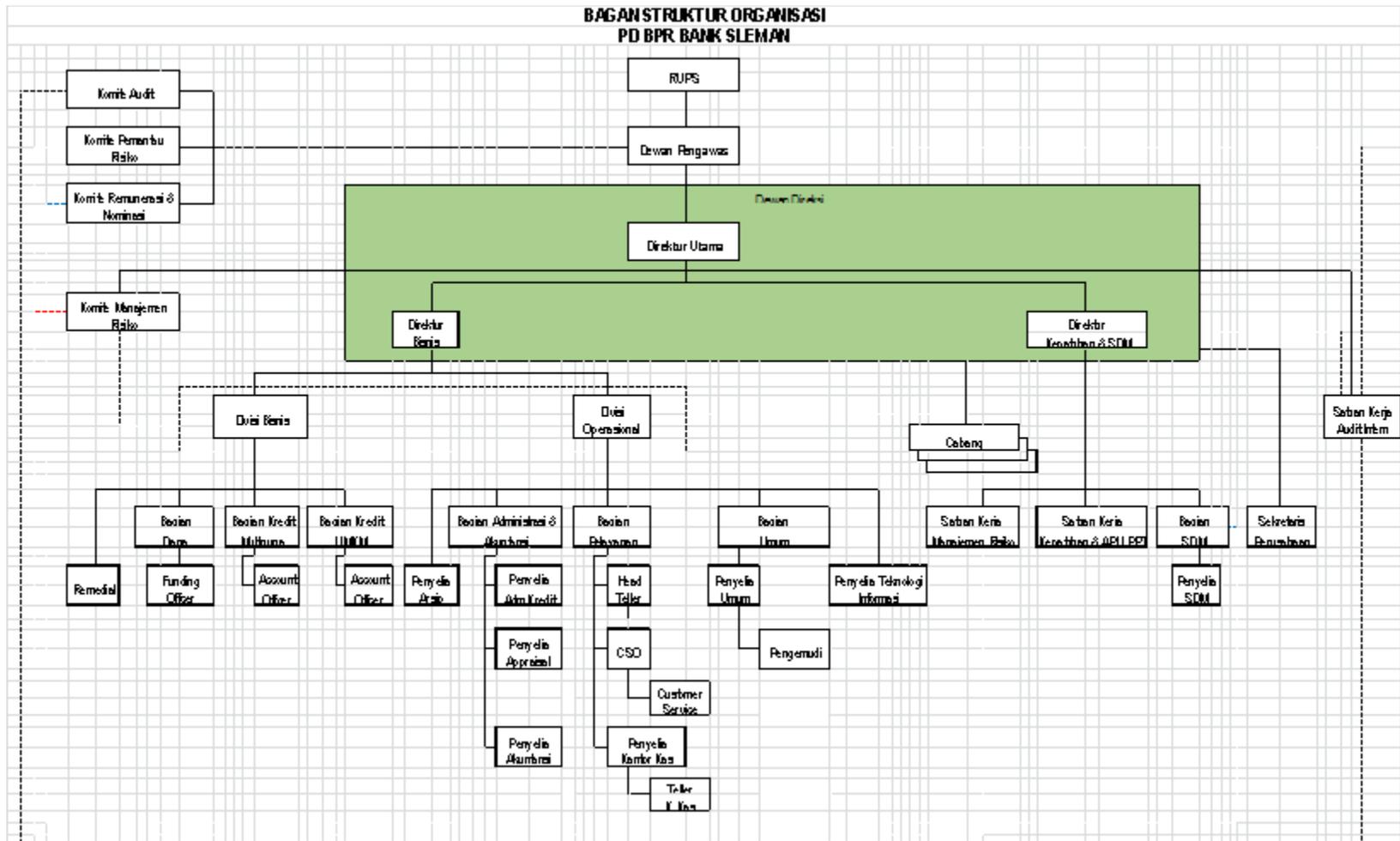
Ketua	: Dra. Suyamsih, M.Pd
Anggota	: Ir. Tjahjo Oetomo, M.M
Anggota	: Dr. Sumiyana, M.Si., Ak., CA
Direksi	
Direktur Utama	: Muhammad Sigit, S.E., M.Si
Direktur Bisnis	: Ir. Yustinus Mahatma
Direktur Kepatuhan SDM	: Iis Herlia Dewi, S.E
Kepala Audit Intern	: Atik Sukonengrom, S.E
Kepala Divisi	
Divisi Operasional	: Sulastri, S.E., M.M
Divisi Bisnis	: Ismantoro, S.E., M.M
Kantor Cabang	
Kepala Cabang Godean	: Erna Ekawati, S.E
Kepala Bagian	
Satuan Manajemen Risiko	: Nur Jayatiningsih, S.H
Satuan Kerja Kepatuhan	: Oktaria Tri Handari, S.P
Bagian Kredit Multigun	: Rusbandi, S.E
Bagian Kredit UMKM	: Dandung Sriyadi, S.E
Bagian Dana	: Wondo Supriyanto, S.E
Bagian Pelayanan	: Sri Wahyuningsih, S.E

Bagian Administrasi dan Akuntansi :Yunisfi Ekasari Rakhmatika, S.E

Bagian Sumber Daya Manusia(SDM) : Hestuti, S.E

Bagian Umum : Teguh Supriyanto, S.E

Gambar Struktur Organisasi



#### 4. Sistem dan Prosedur Kerja

Bahasan berikut ini akan diuraikan tentang tugas dan kewenangan masing-masing bagian yang terkait dalam sistem operasional bank:

1. Dewan Pengawas

Fungsi Dewan Pengawas adalah unsur pengawasan operasional Bank Sleman yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Tugas-tugas Dewan Pengawas:

- a. Menetapkan kebijaksanaan umum
- b. Menjalankan pengawasan
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap  
Bank Sleman

2. Komite Audit

Tugas Komite Audit adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan audit intern dan ekstern.

3. Komite Pemantau Risiko

Tugas Komite Pemantau Risiko adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan penerapan manajemen risiko.

4. Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan Remunerasi dan Nominasi.

5. Dewan Direksi

Fungsi dari Dewan Direksi adalah organ bank yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan dan SDM yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank Sleman.

Tugas Dewan Direksi:

- a. Menyusun perencanaan
- b. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar anggota Direksi
- c. Melakukan pembinaan serta pengendalian seluruh kegiatan operasional Bank Sleman berdasarkan asas keseimbangan dan keserasian

6. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Fungsi SKAI adalah satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Tugas SKAI:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan

operasional bank yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasioanal dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

#### 7. Komite Manajemen Risiko

Fungsi Komite Manajemen Risiko adalah komite yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Tugas Komite Manajemen Risiko:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- b. Melakukan perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.

- c. Melakukan pertimbangan dan atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

#### 8. Divisi Bisnis

Fungsi Divisi Bisnis adalah memasarkan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan menghimpun dana dari masyarakat atau lembaga lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Tugas Divisi Bisnis:

- a. Menentukan target pasar, segmen dan daerah pemasaran.
- b. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan strategik baik kredit maupun dana.
- c. Menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta menyalurkan dalam bentuk kredit.
- d. Memberikan putusan kredit sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.
- e. Mengusulkan kepada Direksi dalam komite kredit terhadap putusan kredit di atas kewenangannya.
- f. Melakukan negosiasi dengan pihak terkait baik dana maupun kredit.

- g. Melakukan kegiatan promosi, literasi dan edukasi baik dalam menghimpun dana maupun penyalurannya.
- h. Mengelola kualitas kredit.
- i. Memantau dan menjaga rasio *Loan Deposit Ratio* dan *Cost of fund*.
- j. Melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang dan bagian dibawah koordinasi terhadap pencapaian target bisnis.
- k. Membuat rencana penyelesaian kredit bermasalah.
- l. Mengusulkan kepada Direksi atas rencana kredit yang dihapus bukuan.
- m. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dibawah koordinasinya.
- n. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dibidang tugasnya.

Divisi Bisnis terdiri dari:

#### 1. Bagian Dana

Fungsi Bagian Dana adalah mengusahakan, menghimpun dan mengkoordinasikan pengembangan dana Bank Sleman.

#### Tugas Bagian Dana:

- a. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahannya terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas Funding Officer dan staf dibawahnya.
- b. Melakukan usaha pengembangan dan.
- c. Melakukan administrasi dibidang tugasnya.
- d. Mencari nasabah dan atau menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
- e. Melakukan promosi, literasi dan edukasi perbankan kepada masyarakat.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

#### 2. Bagian Kredit Multiguna

Fungsi bagian Kredit Multiguna yaitu melakukan pemberian kredit kepada nasabah yang berpenghasilan tetap. Bagian Kredit Multiguna terdiri dari *Account Officer* dan *Analisis Kredit Multiguna*.

#### Tugas Kredit Multiguna:

- a) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas *Account Officer* dan staf dibawahnya.
- b) Melakukan perluasan pangsa pasar perkreditan.
- c) Melakukan penelitian syarat-syarat Kredit Multiguna.
- d) Melakukan analisa Kredit Multiguna.
- e) Memberikan putusan Kredit Multiguna sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.
- f) Mengusulkan kepada Divisi Bisnis terhadap putusan Kredit Multigun diatas kewenangannya.
- g) Melakukan perencanaan Kredit Multiguna.
- h) Melakukan promosi, literasi dan edukasi perbankan kepada masyarakat.
- i) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kualitas Kredit Multiguna.
- j) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

### 3. Bagian Kredit UMKM

Fungsi bagian Kredit UMKM adalah melakukan pemberian kredit kepada nasabah UMKM di Kantor

Pusat. Bagian kredit UMKM terdiri dari *Account Officer* dan Analis Kredit UMKM.

Tugas Bagian Kredit UMKM:

- a) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas *Account Officer* dan staf dibawahnya.
- b) Melakukan perluasan pangsa pasar perkreditan.
- c) Melakukan penelitian syarat-syarat Kredit UMKM.
- d) Melakukan analisa Kredit UMKM.
- e) Memberikan putusan Kredit UMKM sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.
- f) Mengusulkan kepada Divisi Bisnis terhadap permohonan kredit UMKM dan kewenangannya.
- g) Melakukan perencanaan kredit UMKM.
- h) Mencari nasabah, menyalurkan dana serta mengevaluasi kredit UMKM.
- i) Melakukan promosi, literasi dan edukasi perbankan kepada masyarakat.
- j) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kualitas kredit UMKM.

- k) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

#### 4. Divisi Operasional

Fungsi Divisi Operasional adalah merencanakan, mengkoordinasi, monitoring, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan keuangan akuntansi, administrasi, pelayanan, umum, teknologi informasi dan kearsipan.

Tugas Divisi Operasional:

- a) Merencanakan dan melaksanakan kebijakan di bidang operasional Bank Sleman.
- b) Melakukan identifikasi masalah yang timbul dari pelaksanaan tugas operasional Bank Sleman dalam rangka usaha perbaikan penyelenggaraan tata kerja prosedur dari unit kerja organisasi.
- c) Melakukan pengumpulan, penyusunan, pengolaan dan mengikuti pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi pemertintah terutama di bidang moneter perbankan.
- d) Mengelola serta memonitor kas, dokumen dan surat-surat berharga.
- e) Memonitoring kegiatan pelayanan intern dan ekstern.

- f) Memprakarsai pengadaan dan pengurangan sarana dan prasarana kerja.
- g) Membuat perencanaan, pengembangan dan pengadaan serta pemeliharaan teknologi informasi.
- h) Memonitoring dan evaluasi kegiatan kearsipan. Melakukan evaluasi dari laporan-laporan setiap bagian dibawahnya.
- i) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Divisi Operasional terdiri dari:

1) Bagian Administras dan Akuntansi

Fungsi Bagian Administras dan Akuntansi adalah merencanakan, mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi serta melaporkan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan keuangan, akuntansi, administrasi kredit dan appraisal.

Bagian Administrasi dan Akuntansi terdiri dari:

(1) Penyelia Administrasi Kredit

Tugas Penyelia Administrasi Kredit adalah menatausahakan dan menyimpan dokumen kredit, administrasi kredit serta laporan lainnya yang berkaitan dengan perkreditan.

(2) Penyelia Apprasial

Tugas Penyelia Appraisal adalah melakukan proses penilaian, mengadministrasikan dan bertanggung jawab atas agunan.

(3) Penyelia Akuntansi

Tugas Penyelia Akuntansi adalah melakukan verifikasi, analisis terhadap kebenaran atau akurasi transaksi keuangan sesuai proses pencatatan akuntansi dan pos-pos antar rekening serta membuat laporan keuangan.

2) Bagian Pelayanan

Fungsi Bagian Pelayanan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelayanan di Kantor Pusat dan Kantor Kas.

Tugas Bagian Pelayanan:

- a) Melakukan koordinasi, pengawasan dan mengarahkan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas pelayanan di Kantor Pusat dan Kantor Kas.
- b) Menjamin terlaksananya standar pelayanan.
- c) Mengatur persediaan uang tunai yang efisien.
- d) Melakukan penyetoran atau pengambilan dari bank koresponden lainnya.
- e) Menjaga kelancaran pelayanan administrasi dan likuiditas.
- f) Mengelola surat berharga berupa bilyet deposito, buku tabungan dan kartu ATM.
- g) Melakukan tugas *Treasury*.

- h) Monitoring pelaksanaan kegiatan transaksi perbankan yang berkaitan dengan pihak ketiga.
- i) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Bagian Pelayanan terdiri dari:

(1) *Head Teller*

Tugas *Head Teller* adalah mengatur persediaan uang tunai yang efisien dan melakukan penyetoran atau pengambilan dari bank koresponden lainnya.

(2) *Customer Services Officer*

Tugas *Customer Services Officer* adalah menjamin terlaksananya standar pelayanan, memberikan informasi produk-produk layanan perbankan kepada nasabah serta melaksanakan penerapan program APU PPT baik di Kantor Pusat maupun Kantor Kas.

(3) Penyelia Kantor Kas

Tugas Penyelia Kantor Kas adalah menerima transaksi setoran dan penarikan dana serta melakukan pemasaran produk layanan Bank Sleman.

3) Bagian Umum

Fungsi Bagian Umum adalah merencanakan, mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengadaan, administrasi, perlengkapan, kerumahtanggan, pemeliharaan dan aset perusahaan.

Tugas Bagian Umum:

- a. Melakukan koordinasi, perencanaan, pengawasan dan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan di Bagian Umum.
- b. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa di Bagian Umum.
- c. Melakukan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggan.
- d. Melakukan pengelolaan inventaris kantor.
- e. Mendukung pelaksanaan Sosial Media.
- f. Memelihara dan menjaga keamanan kantor.
- g. Mengatur kelancaran transportasi untuk mendukung kegiatan operasional Bank Sleman.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Penyelia Umum mempunyai tugas yaitu mendukung kegiatan di Bagian Umum.

#### 4) Penyelia Teknologi Informasi

Fungsi Penyelia Teknologi Informasi adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau mengelola sistem informasi manajemen.

Tugas Penyelia Teknologi Informasi:

- a. Melakukan koordinasi, perencanaan, pengawasan dan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan di Bagian Teknologi Informasi.

- b. Mendukung pengembangan dan atau pengadaan sistem dan prosedur Teknologi Informasi serta Sistem Informasi Manajemen (SIM).
- c. Mendukung Implementasi, operasional dan pemeliharaan Teknologi Informasi.
- d. Melakukan upaya penyelesaian terkait operasional Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh bagian lain pengguna Teknologi Informasi.
- e. Membantu Direksi dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.
- f. Mengelola sistem dokumentasi serta pengamanan data (*back up data*) atau administrasi, laporan keuangan dan pengolahan data penting lainnya.
- g. Melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain untuk peningkatan Pelayanan Bank (*Competitive Service*) dengan penambahan fitur, *software* bantu dan lainnya terkait Teknologi Informasi.
- h. Melakukan koordinasi dengan *Software Core Banking System Vendor* dalam semua hal berkaitan dengan *Core Banking System*(CBS), untuk peningkatan kualitas, kecepatan, kapasitas proses CBS.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

## 5) Penyelia Arsip

Fungsi Penyelia Arsip adalah mengolah dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penggunaan pemeliharaan dan penyusutan arsip.

Tugas Penyelia Arsip:

- a. Memelihara arsip yaitu menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
- b. Melaksanakan pengamanan dan menyelamatkan arsip serat tempat penyimpanan arsip dari bencana alam.
- c. Melaksanakan pengelolaan arsip aktif sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- d. Menyusun daftar arsip inaktif sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- e. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan public.
- f. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kearsipan.
- g. Melaksanakan pemusnahan arsip sesuai prosedur yang berlaku.
- h. Mengatur arsip untuk mendukung kegiatan operasional Bank Sleman.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah satuan kerja yang melaksanakan penerapan manajemen risiko dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan SDM serta melakukan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank Sleman.

Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi kerangka manajemen risiko.
- b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko secara berkala kepada Direktur Kepatuhan dan SDM.
- d. Memantau implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direktur Utama.
- e. Memantau posisi atau *eksposur* risiko secara keseluruhan per risiko dengan cara membandingkan risiko *actual* dengan minim risiko yang telah ditetapkan.
- f. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebutuhan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio kinerja masing-masing kerja operasional.

- g. Mengkaji usulan aktivitas dan atau produk baru yang dikembangkan terhadap sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap *eksposur* secara keseluruhan.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidng tugasnya.

1. Satuan Kerja Kepatuhan dan APU PPT

Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan dan APU PPT adalah satuan kerja yang melaksanakan kepatuhan Bank Sleman yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan SDM serta melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem prosedur dan menjamin pelaksanaan penerapan program APU dan PPT serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Sleman telah sesuai dengan peraturan otoritas keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepada Bank Sleman terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank Sleman kepada otoritas keuangan dan atau otoritas lain seperti Bank Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dan atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Tugas Satuan Kerja Kepatuhan dan APU PPT:

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan otoritas keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh yang terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini sesuai dengan perundang-undangan lain yang relevan.
- c. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan kepada setiap bagian.
- e. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank Sleman.
- f. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada Direksi Kepatuhan dan SDM.
- g. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- h. Melakukan review dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank Sleman agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

## 2. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Fungsi Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merencanakan, mengkoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi serta melaporkan pengembangan sumber daya manusia dan administrasi kepegawaian, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan SDM.

Tugas Bagian Sumber Daya Manusia (SDM):

- a. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan pelaksanaan supervisor dan staf dibawahnya.
- b. Melakukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia.
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
- d. Merencanakan pola karier serta pendidikan dan latihan pegawai.
- e. Mengelola dana pensiun pegawai.
- f. Mediasi dan fasilitasi Direksi dan pegawai yang telah purna tugas.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

## 3. Penyelia Sumber Daya Manusia

Tugas Penyelia Sumber Daya Manusia adalah mendukung kegiatan dibagian Sumber Daya Manusia (SDM).

#### 4. Sekertaris Perusahaan

Fungsi Sekertaris Perusahaan adalah memberikan pelayanan kepada *stakeholder* atas informasi yang dibutuhkan dan sebagai penghubung antara Bank Sleman dan *stakholders* dalam pelaksanaan tata kelola.

Tugas Sekertaris Perusahaan:

- a. Mengatur aktivitas perusahaan antara lain meliputi administrasi, pengaturan jadwal rapat hingga *Human Relation*.
- b. Menjadi penghubung antara Bank Sleman dengan *stakeholders*.
- c. Memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran Direksi.
- d. Menyusun *Annula Report* Bank Sleman.
- e. Menyusun laporan tata kelola Bank Sleman.
- f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis bank.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil.

#### 5. Kantor Cabang

Fungsi Kantor Cabang adalah merencanakan, mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Kantor Cabang.

Tugas Kantor Cabang:

- a. Melakukan koordinasi, perencanaan, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas Kantor Cabang.

- b. Menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c. Memberikan putusan kredit sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.
- d. Mengusulkan kepada Direksi dalam komite kredit terhadap putusan kredit diatas kewenangannya.
- e. Mengelola kualitas kredit di Kantor Cabang.
- f. Memantau dan menjaga rasio *Loan to Deposit Ratio dan Cost of Fund* di Kantor Cabang.
- g. Melakukan negosiasi dengan pihak terkait baik dana maupun kredit di Kantor Cabang.
- h. Melakukan kegiatan akuntansi seluruh transaksi operasional Kantor Cabang.
- i. Melakukan administrasi kegiatan di Kantor Cabang.
- j. Melaksanakan penyimpanan agunan kredit dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan operasional Kantor Cabang.
- k. Mengatur persediaan uang tunai secara efisien dan menjaga likuiditas.
- l. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bagian di Kantor Cabang.
- m. Melakukan promosi, literasi dan edukasi perbankan kepada masyarakat.
- n. Membuat rencan bisnis Kantor Cabang.
- o. Menjamin pelaksanaan penerapan program APU PPT di Kantor Cabang.

- p. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil.

#### **A. Produk dan Jasa Institusi**

1. Produk penghimpunan dana, antara lain:

a. Tabungan Bank Sleman

Tabungan Bank Sleman merupakan tabungan yang digunakan sebagai produk simpanan dana masyarakat umum dan tabungan wajib bagi para debitur penerima kredit tertentu di PD BPR Bank Sleman. Tabungan ini dirancang sebagai salah satu pilihan investasi bagi masyarakat yang lebih mengutamakan manfaat menabung dalam jangka panjang.

b. Tabungan Mutiara

Tabungan Mutiara adalah salah satu produk tabungan yang bukan hanya menawarkan fitur unggulan berupa Kartu ATM yang dapat digunakan untuk bertransaksi di seantero nusantara. Namun juga memberikan peluang mendapatkan hadiah fantastis, berupa mobil, motor, batangan emas, tabungan dan berbagai peralatan elektronik yang diundi setiap tahun. Fasilitas ATM yang dapat digunakan di ATM Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. Syarat-syarat Tabungan Mutiara:

- 1) Setoran awal minimal Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah)
- 2) Saldo minimal Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), apabila saldo berada dibawah saldo minimal maka akan dikenakan biaya Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) per bulan dan akan ditutup secara otomatis apabila telah mencapai saldo Rp 0,00 (Nol rupiah).

- 3) Setiap point hadiah diperoleh berdasarkan kelipatan saldo Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari saldo rata-rata per bulan.
- 4) Setiap rekening Tabungan Mutiara dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) per bulan.
- 5) Penabung adalah Warga Negara Indonesia.
- 6) Menyerahkan bukti identitas (KTP, KK, SIM, Paspor, Kartu Pelajar, Akte Kelahiran dan atau identitas lainnya yang sah).
- 7) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening tabungan dan formulir Customer Due Diligence (CDD).

c. Tabungan Tamasya Plus

Tabungan Tamasya Plus merupakan tabungan berhadiah yang diundi pada periode tertentu atas dasar point undian yang diperoleh pada setiap bulannya. Tabungan tamasya plus diselenggarakan oleh 43 BPR se-DIY dibawah naungan Yayasan PERBARINDO DIY.

d. Tabungan Arofah

Tabungan Arofah merupakan tabungan yang disediakan khusus untuk nasabah yang ingin mewujudkan niat suci untuk menjalankan ibadah haji di Baitullah.

e. TabunganKu

TabunganKu merupakan produk yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung sejak dini, sehingga produk ini difokuskan untuk para pelajar sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA. Syarat yang diberikan mudah dan ringan sebagaimana yang diterbitkan

secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Tabungan Pensiun (TAPEN)

Tabungan yang bertujuan sebagai solusi investasi bagi para pegawai (PNS, Swasta, TNI, Polri, dll) atau pelaku usaha yang tidak memiliki jaminan kesejahteraan di masa purnakarya (pensiun). Tabungan Pensiun juga menjadi solusi mengurangi dampak risiko kerja seperti PHK.

g. Tabungan SimPel

Produk tabungan pelajar yang diterbitkan secara nasional bertujuan untuk memberikan edukasi pengelolaan keuangan dan meningkatkan budaya menabung sejak dini di kalangan pelajar Indonesia (PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK) atau sederajat yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Dalam rangka mendukung Program Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, PD BPR Bank Sleman. Syarat-syarat Simpanan Pelajar:

- 1) Setoran awal minimal Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).
- 3) Saldo minimal Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).
- 4) Biaya penutupan rekening Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).
- 5) Penabung adalah Pelajar Warga Negara Indonesia.

- 6) Menyerahkan bukti identitas (Kartu Pelajar, Kartu Keluarga).
- 7) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening tabungan dan formulir Customer Due Diligence (CDD).
- 8) Kepada pelajar yang menabung diberikan buku Tabungan SimPel.

## 2. Produk Penyaluran dana

### a. Kredit Multiguna

Dalam rangka memberikan kredit yang ditujukan untuk keperluan konsumtif maupun untuk kepentingan lainnya bagi debitur yang berstatus karyawan suatu instansi/perusahaan diantaranya PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD, Karyawan Swasta maupun karyawan lain yang mempunyai penghasilan tetap. Fasilitas kredit diberikan kepada karyawan instansi/perusahaan dilakukan secara kolektif yang didasari kerjasama antara Bank dengan pihak instansi/karyawan, PD BPR Bank Sleman memberikan produk Pinjaman yang berupa Kredit Multiguna. Kredit Multiguna adalah produk layanan kredit yang disediakan bagi para Aparat Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri dan BUMN/BUMD. Selain dapat menjadi alternatif solusi bagi pemenuhan keuangan untuk kebutuhan investasi, kredit pegawai juga banyak digunakan sebagai modal kerja kegiatan ekonomi produktif untuk peningkatan taraf kesejahteraan hidup. Syarat-syarat kredit multiguna:

- 1) WNI
- 2) Cakap hukum (Sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan atau sudah menikah).

- 3) Dapat menunjukkan identitas diri berupa KTP yang masih berlaku dan diutamakan berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Mengajukan permohonan Kredit Multiguna kepada PD BPR Bank Sleman.
- 5) Bersedia dilakukan evaluasi usaha maupun jaminan (apabila ada).
- 6) Bersedia menandatangani surat perjanjian kredit yang tersedia di PD BPR Bank Sleman dengan datang sendiri (tidak diwakilkan) dan atau dihadapan petugas PD BPR Bank Sleman serta mentaati / mematuhi isi perjanjian dimaksud.
- 7) Debitur lama diperkenankan mengajukan Kredit Multi Guna apabila angsuran kredit di PD BPR bank Sleman memiliki kolektibilitas pinjaman sebelumnya lancar.
- 8) Seluruh permohonan Kredit Multiguna dilakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Debitur (SID).

b. Kredit UMKM

Merupakan kredit yang disediakan bagi masyarakat umum khususnya para pelaku usaha. Salah satunya kredit Multiusaha yang menjadi pilihan bijak untuk mengembangkan usaha, baik untuk keperluan investasi maupun untuk modal kerja.

c. Kredit Krisan

Kredit yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha kecil dan mikro di Kabupaten Sleman.

d. Kredit Krido

Kredit yang disalurkan kepada para pelaku usaha penerima layanan Kredit Krisan yang memperpanjang kerjasama kemitraannya dengan PD BPR Bank Sleman.

e. Kredit KUBS

Kredit yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Debitur Kredit KUBS yaitu peminjam baik perorangan, kelompok yang memperoleh satu atau lebih fasilitas kredit serta terikat dengan kewajiban atas fasilitas kredit yang dinikmatinya sebagaimana yang disetujui dan disepakati dalam akad perjanjian dan perikatan kredit.

3. Deposito Berlian

Produk layanan simpanan dana di PD BPR Bank Sleman dengan masa keterikatan jangka waktu tertentu. Pilihan jangka waktu simpanan untuk jenis simpanan deposito sangat fleksibel, tersedia mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

4. Layanan dan Jasa

a. Transfer

b. Pembayaran Telfon

- c. Pembayaran Listrik
- d. Pembayaran Air
- e. Pembelian Pulsa
- f. Pembelian Tiket Kereta Api dan Pesawat

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Analisis Rasio Arus Kas

Berikut ini adalah hasil perhitungan dan analisis rasio arus kas Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman. Menurut Meldawati (2012) rasio yang digunakan sebagai alat pengukuran atau penilaian terdiri dari :

#### a. Rasio Arus Kas Operasi (AKO)

$$\frac{\text{Jumlah Arus Kas Operasi}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Apabila rasio arus kas operasi dibawah satu (<1) berarti terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar.

#### a) Rasio Arus Kas Operasi (AKO) tahun 2014

$$\frac{53.318.741.419}{4.356.026.826} = 12,24$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas operasi untuk tahun 2014 adalah sebesar 12,24 % , rasio tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di atas satu (>1) yang berarti perusahaan mampu membayar kewajiban lancar tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain.

#### b) Rasio Arus Kas Operasi (AKO) tahun 2015

$$\frac{22.473.309.935}{5.173.441.549} = 4,34$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas operasi untuk tahun 2015 adalah sebesar 4,34 % , rasio tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di atas satu (>1) yang berarti perusahaan mampu membayar kewajiban lancar tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Namun terjadi penurunan rasio sebesar 7,9 %.

c) Rasio Arus Kas Operasi (AKO) tahun 2016

$$\frac{20.978.841.317}{5.506.808.624} = 3,80$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas operasi untuk tahun 2016 adalah sebesar 3,80 % , rasio tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di atas satu (>1) yang berarti perusahaan mampu membayar kewajiban lancar tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Namun terjadi penurunan rasio sebesar 0,54 %.

d) Rasio Arus Kas Operasi (AKO) tahun 2017

$$\frac{6.900.746.015}{5.282.977.236} = 1,30$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas operasi untuk tahun 2017 adalah sebesar 1,30 % , rasio tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di atas satu (>1) yang berarti perusahaan mampu membayar kewajiban lancar tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Namun terjadi penurunan rasio sebesar 2,5%.

e) Rasio Arus Kas Operasi (AKO) tahun 2018

$$\frac{4.821.446.459}{6.503.892.238} = 0,74$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas operasi untuk tahun 2018 adalah sebesar 0,74 % , rasio tersebut menunjukkan bahwa rasio arus kas berada di bawah satu (<1) yang berarti perusahaan belum mampu membayar kewajiban lancar tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain dan terjadi penurunan rasio sebesar 0,56%.

**b. Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB)**

$$CKB = \frac{\text{Arus kas Operasi} + \text{Bunga} + \text{Pajak}}{\text{Bunga}}$$

Apabila rasio cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1), menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menutup biaya bunga.

a) Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB) tahun 2014

$$\frac{53.318.741.419 + 26.049.941.195 + 5.487.799.000}{26.049.941.195} = 3,25$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 3,25 yang berarti perusahaan memiliki kemampuan 3 dalam menutupi biaya bunga.

b) Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB) tahun 2015

$$\frac{22.473.309.935 + 30.871.701.664 + 6.114.803.000}{30.871.701.664} = 1,92$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 1,92 yang berarti perusahaan memiliki kemampuan 2 kali dalam menutupi biaya bunga.

c) Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB) tahun 2016

$$\frac{20.978.841.317 + 32.402.994.970 + 6.831.914.250}{32.402.994.970} = 1,85$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 1,85 yang berarti perusahaan memiliki kemampuan 2 kali dalam menutupi biaya bunga.

d) Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB) tahun 2017

$$\frac{6.900.746.015 + 29.878.641.357 + 7.940.035.500}{29.878.641.357} = 1,49$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 1,49 yang berarti perusahaan memiliki kemampuan 1,5 kali dalam menutupi biaya bunga.

e) Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB) tahun 2018

$$\frac{4.821.446.459 + 26.951.684.044 + 8.254.252.000}{26.951.684.044} = 1,48$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 cakupan kas terhadap bunga berada diatas satu (>1) yaitu sebesar 1,48 yang berarti perusahaan memiliki kemampuan 1,5 dalam menutupi biaya bunga.

**c. Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL)**

$$CKHL = \frac{\text{Arus Kas Operasi} + \text{Dividen Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Apabila rasio cakupan kas terhadap hutang lancar berada dibawah satu (<1), menunjukkan bahwa perusahaan dalam membayar kewajiban lancar sangat rendah.

a) Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL) tahun

2014

$$\frac{53.318.741.419 + 5.613.576.642}{4.356.026.826} = 13,5$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 cakupan kas terhadap hutang lancar diatas satu (>1) atau sebesar 13,5 kali. Sama halnya dengan rasio arus kas operasi, yang membedakan dalam rasio cakupan kas terhadap hutang lancar yaitu adanya penambahan dividen kas. Karena rasio diatas satu kali maka perusahaan mampu membayar kewajiban lancar.

b) Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL) tahun

2015

$$\frac{22.473.309.935 + 7.273.432.063}{5.173.441.549} = 5,74$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 cakupan kas terhadap hutang lancar diatas satu (>1) atau sebesar 5.74 kali. Sama halnya dengan rasio arus kas operasi, yang membedakan dalam rasio cakupan kas terhadap hutang lancar yaitu adanya penambahan dividen kas. Karena rasio diatas satu kali maka perusahaan mampu membayar kewajiban lancar.

c) Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL) tahun

2016

$$\frac{20.978.841.317 + 8.533.477.508}{5.506.808.624} = 5,35$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 cakupan kas terhadap hutang lancar diatas satu (>1) atau sebesar 5,35 kali. Sama halnya dengan rasio arus kas operasi, yang membedakan dalam rasio cakupan kas terhadap hutang lancar yaitu adanya penambahan dividen kas. Karena rasio diatas satu kali maka perusahaan mampu membayar kewajiban lancar.

d) Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL) tahun

2017

$$\frac{6.900.746.015 + 9.084.830.552}{5.282.977.236} = 3,02$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 cakupan kas terhadap hutang lancar diatas satu (>1) atau sebesar 3,02 kali. Sama halnya dengan rasio arus kas operasi, yang membedakan dalam rasio cakupan kas terhadap hutang lancar yaitu adanya penambahan dividen kas. Karena rasio diatas satu kali maka perusahaan mampu membayar kewajiban lancar.

e) Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL) tahun

2018

$$\frac{4.821.446.459 + 10.463.796.563}{6.503.892.238} = 2,35$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 cakupan kas terhadap hutang lancar diatas satu (>1) atau sebesar 2,35 kali. Sama halnya dengan rasio arus kas operasi, yang membedakan dalam rasio cakupan kas terhadap hutang lancar yaitu adanya penambahan dividen kas. Karena rasio diatas satu kali maka perusahaan mampu membayar kewajiban lancar.

**d. Rasio Pengeluaran Modal (PM)**

$$PM = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Pengeluaran Modal}}$$

Apabila rasio pengeluaran modal berada di bawah satu (< 1), menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu membiayai pengeluaran modalnya.

a) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2014

$$\frac{53.318.741.419}{40.652.500} = 1.311$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio pengeluaran modal pada tahun 2014 berada diatas satu (>1) atau kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal perusahaan adalah 1.311 kali. Hal ini berarti pada tahun 2014 terjadi peningkatan kinerja keuangan perusahaan dapat menutupi biaya pengeluaran modalnya seperti biaya perolehan aset tetap.

b) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2015

$$\frac{22.473.309.935}{1.090.220.000} = 20,6$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio pengeluaran modal pada tahun 2015 berada diatas satu (>1) atau kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal perusahaan adalah 20 kali. Hal ini berarti perusahaan dapat menutupi biaya pengeluaran modalnya seperti biaya perolehan aset tetap.

c) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2016

$$\frac{20.978.841.317}{1.944.415.750} = 10,7$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio pengeluaran modal pada tahun 2016 berada diatas satu (>1)

atau kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal perusahaan adalah 11 kali. Hal ini berarti perusahaan dapat menutupi biaya pengeluaran modalnya seperti biaya perolehan aset tetap.

d) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2017

$$\frac{6.900.746.015}{965.372.844} = 7,14$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio pengeluaran modal pada tahun 2017 berada diatas satu (>1) atau kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal perusahaan adalah 7 kali. Hal ini berarti perusahaan dapat menutupi biaya pengeluaran modalnya seperti biaya perolehan aset tetap.

e) Rasio Pengeluaran Modal (PM) tahun 2018

$$\frac{4.821.446.459}{5.598.746.015} = 0,86$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio pengeluaran modal pada tahun 2018 berada diatas satu (<1) atau kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal perusahaan adalah 0,86 kali. Hal ini berarti pada tahun 2018 terjadi penurunan kinerja keuangan perusahaan tidak dapat menutupi biaya pengeluaran modalnya seperti biaya perolehan aset tetap.

**e. Rasio Total Hutang (TH)**

$$TH = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Hutang}}$$

Rasio yang cukup rendah menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan.

a) Rasio Total Hutang (TH) tahun 2014

$$\frac{53.318.741.419}{378.529.316.598} = 0,14$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio total hutang pada tahun 2014 berada dibawah satu (<1) atau kemampuan arus kas operasi dalam membayar total hutang adalah 0,14 kali. Hal ini berarti perusahaan tidak dapat membayar hutang perusahaan jika hanya mengandalkan arus kas operasi.

b) Rasio Total Hutang (TH) tahun 2015

$$\frac{22.473.309.935}{472.775.432.631} = 0,047$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio total hutang pada tahun 2015 berada dibawah satu (<1) atau kemampuan arus kas operasi dalam membayar total hutang adalah 0,047 kali. Hal ini berarti perusahaan tidak dapat membayar hutang perusahaan jika hanya mengandalkan arus kas operasi.

c) Rasio Total Hutang (TH) tahun 2016

$$\frac{20.978.841.317}{524.150.846.603} = 0,040$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio total hutang pada tahun 2016 berada dibawah satu (<1) atau kemampuan arus kas operasi dalam membayar total hutang adalah 0,040 kali. Hal ini berarti perusahaan tidak dapat membayar hutang perusahaan jika hanya mengandalkan arus kas operasi.

d) Rasio Total Hutang (TH) tahun 2017

$$\frac{6.900.746.015}{535.334.327.609} = 0,012$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio total hutang pada tahun 2014 berada dibawah satu (<1) atau kemampuan arus kas operasi dalam membayar total hutang adalah 0,012 kali. Hal ini berarti perusahaan tidak dapat membayar hutang perusahaan jika hanya mengandalkan arus kas operasi.

e) Rasio Total Hutang (TH) tahun 2018

$$\frac{4.821.446.459}{549.921.486.296} = 0,008$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio total hutang pada tahun 2014 berada dibawah satu (<1) atau kemampuan arus kas operasi dalam membayar total hutang adalah 0,14 kali. Hal ini berarti perusahaan tidak dapat membayar hutang perusahaan jika hanya mengandalkan arus kas operasi.

**f. Rasio Kecakupan Arus Kas (KAK)**

$$\text{KAK} = \frac{\text{EBIT} - \text{Bunga} - \text{Pajak} - \text{Pengeluaran Modal}}{\text{Rata - rata Hutang lancar}}$$

Semakin rendah rasio semakin rendah kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

a) Rasio Kecakupan Arus Kas (KAK) tahun 2014

$$\frac{46.084.604.322 - 26.049.941.195 - 5.487.799.000 - 40.652.500}{5.364.629.294} = 2,7$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio kecukupan arus kas pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,7 kali. Perusahaan memiliki kemampuan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

b) Rasio Kecakupan Arus Kas (KAK) tahun 2015

$$\frac{54.053.459.681 - 30.871.701.664 - 6.114.803.000 - 1.090.220.000}{5.364.629.294} = 2,9$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio kecukupan arus kas pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,9 kali. Perusahaan memiliki kemampuan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

c) Rasio Kecakupan Arus Kas (KAK) tahun 2016

$$\frac{57.404.570.325 - 32.402.994.970 - 6.831.914.250 - 1.944.415.750}{5.364.629.294} = 3,02$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio kecukupan arus kas pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,02 kali. Perusahaan memiliki kemampuan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

d) Rasio Kecakupan Arus Kas (KAK) tahun 2017

$$\frac{58.746.269.982 - 29.878.641.357 - 7.940.035.500 - 965.372.844}{5.364.629.294} = 3,72$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio kecukupan arus kas pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,72 kali. Perusahaan memiliki kemampuan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

e) Rasio Kecakupan Arus Kas (KAK) tahun 2018

$$\frac{57.846.131.888 - 26.951.684.044 - 8.254.252.000 - 5.598.746.015}{5.364.629.294} = 3,17$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio kecukupan arus kas pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,17 kali. Perusahaan memiliki kemampuan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

## 2. Pembahasan Analisis Rasio Arus Kas

**Tabel 4.1**

### **Analisis Rasio Arus Kas**

<b>Rasio/Tahun</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>AKO</b>	12,24%	4,34%	3,80%	1,30%	0,74%
<b>CKB</b>	3,25 kali	1,92 kali	1,85 kali	1,49 kali	1,48 kali
<b>CKHL</b>	13,5 kali	5,74 kali	5,35 kali	3,02 kali	2,35 kali
<b>PM</b>	1.311 kali	20,6 kali	10,7 kali	7,14 kali	0,86 kali
<b>TH</b>	0,14 kali	0,047 kali	0,040 kali	0,012 kali	0,008 kali
<b>KAK</b>	2,7 kali	2,9 kali	3,02 kali	3,72 kali	3,17 kali

Dari Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2014-2017 menunjukkan angka rasio diatas satu ( $>1$ ). Namun angka rasio tersebut menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik atau mengalami penurunan kinerja keuangan karena terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancarnya. Hal itu dibuktikan dengan rasio dibawah ( $<1$ ) satu pada tahun 2018 sehingga perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancarnya tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain.

Rasio arus kas bunga (CKB) menunjukkan pencapaian lebih dari satu ( $>1$ ), pencapaian tertinggi berada di tahun 2014 yaitu 3,25 kali yang berarti kemampuan arus kas operasi dalam menutup biaya bunga perusahaan mengalami peningkatan yang cukup baik. Tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 rasio CKB berada di angka ( $>1$ ) hal itu menunjukkan bahwa arus kas operasi dapat membayar bunga atas hutang.

Rasio cakupan arus kas terhadap hutang lancar (CKHL) menunjukkan pencapaian diatas satu ( $<1$ ) yang berarti perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam menutupi hutang lancarnya ditahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018.

Rasio pengeluaran modal (PM) untuk tahun 2014 menunjukkan pencapaian yang tinggi karena rasio jauh diatas satu ( $>1$ ) yaitu 1.311 kali. Hal itu menunjukkan perusahaan mampu membiayai pengeluaran modalnya. Namun pada tahun setelahnya perusahaan mengalami penurunan angka rasio. Terbukti pada tahun 2018 angka rasio berada di bawah satu ( $<1$ ) yaitu 0,86 kali, sehingga pada tahun 2018 perusahaan tidak mampu membiayai pengeluaran modalnya.

Rasio Total Hutang (TH) menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membayar total hutang perusahaan jika hanya mengandalkan arus kas dari operasi saja. Sehingga untuk menutupi

kewajibannya perusahaan harus menggunakan kas dari aktivitas lainnya agar tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang.

Rasio kecukupan arus kas (KAK) menunjukkan pencapaian rasio yang cukup baik, berarti perusahaan memiliki kemampuan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. Pada tiap tahunnya mengalami sedikit peningkatan angka rasio.

Laporan arus kas PD BPR Bank Sleman menunjukkan arus kas operasi yang semakin menurun. Pada tahun 2014 bank dapat menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 53.318.741.419 sedangkan hanya memiliki kewajiban lancar sebesar Rp 4.356.026.826. Sehingga pada tahun 2014 perusahaan memiliki kemampuan yang besar dalam membayar kewajiban lancar tanpa harus menggunakan kas dari aktivitas lainnya. Dapat dikatakan bahwa PD BPR Bank Sleman memiliki kinerja yang baik pada tahun 2014. Namun setelahnya terjadi penurunan pada jumlah arus kas operasi yang dihasilkan perusahaan. Seperti pada tahun 2015 Bank Sleman menghasilkan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 22.473.309.935. Meskipun perusahaan mampu membayar kewajiban lancar namun tetap saja kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan karena dilihat dari kas dari aktivitas operasi yang menurun. Selama 5 tahun Bank Sleman memiliki kinerja keuangan yang kurang baik karena dilihat dari penurunan arus kas

operasi yang sangat pesat. Pada tahun 2018 Bank Sleman hanya menghasilkan Rp 4.821.446.459 sedangkan kewajiban lancar yang dimiliki sebesar Rp 6.503.892.238. Hal itu menandakan bahwa pada tahun 2018 Bank Sleman memiliki kinerja keuangan yang buruk karena kas dari arus operasi yang dihasilkan tidak dapat menutupi kewajibannya.